

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis terhadap implementasi penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat upaya yang signifikan dalam menegakkan hukum, efektivitas implementasi masih terhambat oleh beberapa faktor. Kepolisian Kota Padang telah mengimplementasikan berbagai upaya, seperti penggunaan sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dan program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Namun, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas masih rendah, seperti yang terlihat dari tingginya angka pelanggaran terkait penggunaan helm, sabuk pengaman, dan pengendara di bawah umur. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kemajuan, kesadaran hukum masyarakat tetap menjadi tantangan besar.

Mengenai kendala yang dihadapi kepolisian, terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Pertama, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat keberhasilan penegakan hukum. Banyak pelanggar yang tidak sepenuhnya memahami atau menghargai pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas, yang memperburuk situasi. Kedua, kendala teknis terkait infrastruktur dan perangkat teknologi, seperti keterbatasan jangkauan ETLE dan masalah teknis pada sistem, juga memengaruhi proses penindakan yang efisien dan tepat waktu. Selain itu, proses penyelesaian pelanggaran yang lambat, di mana lebih dari 5.000 pelanggaran masih dalam proses blokir kendaraan, menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam sistem penanganan pelanggaran.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisis terhadap implementasi penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Padang, berikut beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum:

### **a. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat**

Sosialisasi yang lebih intensif tentang aturan lalu lintas dan bahaya pelanggaran perlu diperluas, terutama di kalangan pengendara muda dan masyarakat yang kurang memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas. Program edukasi dapat melibatkan berbagai pihak, seperti sekolah, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peraturan lalu lintas dan keselamatan berkendara. Selain itu, sosialisasi harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya pada saat-saat tertentu.

### **b. Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi Penegakan Hukum**

Untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum, penting untuk memperluas jangkauan sistem ETLE, baik dengan menambah jumlah kamera ETLE di titik-titik strategis maupun dengan meningkatkan kualitas teknologi yang digunakan. Pemantauan yang lebih luas dan efektif dapat mengurangi peluang pelanggaran yang tidak tercatat, serta membantu petugas untuk melakukan penindakan dengan lebih cepat dan tepat. Selain itu, perbaiki infrastruktur jalan, seperti pemasangan rambu lalu lintas yang lebih jelas dan perbaiki jalan yang rusak, juga dapat mendukung terciptanya sistem lalu lintas yang lebih aman.

### **c. Peningkatan Kerjasama Antar Instansi Kepolisian**

Pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya perlu lebih bersinergi dalam penegakan hukum lalu lintas. Pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam memperbaiki dan memelihara infrastruktur lalu lintas, sedangkan kepolisian dapat meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk memberikan pendidikan lalu lintas sejak usia dini. Sinergi ini juga harus mencakup pengembangan sistem pemantauan

lalu lintas yang lebih canggih dan peningkatan kapasitas petugas dalam menjalankan tugas mereka.

d. Penguatan Sistem Penegakan Hukum yang Lebih Tegas

Kepolisian perlu menerapkan pendekatan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang terdeteksi, seperti memberikan sanksi yang lebih keras bagi pelanggar yang tidak mematuhi aturan keselamatan lalu lintas. Penegakan hukum harus dilakukan dengan adil dan transparan, sehingga dapat menciptakan efek jera bagi para pelanggar. Selain itu, penguatan penegakan hukum juga dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas personel kepolisian melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam menangani berbagai jenis pelanggaran.

e. Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi Berkala

Untuk memastikan efektivitas penegakan hukum, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem yang ada. Hal ini dapat meliputi evaluasi terhadap kinerja ETLE, proses penyelesaian pelanggaran, serta dampak dari sosialisasi dan edukasi yang telah dilakukan. Evaluasi ini dapat digunakan untuk merancang strategi baru yang lebih efektif dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di masa depan.

Dengan langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Padang dapat lebih efektif, mengurangi pelanggaran, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas.